



**RENCANA KERJA TAHUN 2021
(RENJA 2021)**



**JLN. H. AGUS SALIM, PAINAN TELP. (0756) 21504-21032
FAX. 21032 PAINAN - 25611**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan bidang perekonomian selama periode 2016-2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2021). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir tahun anggaran 2021.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, Maret 2020

Kepala

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		ii
BAB I	Pendahuluan	1.
	1.1. Latar Belakang	1.
	1.2. Landasan Hukum	3.
	1.3. Maksud dan Tujuan	4.
	1.4. Sistematika Penulisan	5.
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	6.
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6.
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14.
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14.
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	29.
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29.
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30.
	3.3. Program dan Kegiatan	31.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	40.
BAB V	Penutup	43.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja (Renja OPD)

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindutrisn sesuai Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Dokumen Renja 2021 yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Pesisir Selatan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan: 1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan

RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja adalah penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025; dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2020 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Wajib Non Pelayanan Dasar									
						URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	1		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran								
06	1	02	11	1	02	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya air dan listrik	ketersediaan air,listrik dan jasa komunikasi	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%

06	1	02	11	2	11	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
06	1	02	11	2	21	Mponitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev kegiatan	8 laporan	0	0	0	0	4 laporan	4 laporan	50%
06	1	02	11	2	22	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	36 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 bulan	83%
1	1	02	11	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (bulan)	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	60 bulan	83%
1	1	02	11	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dibeli	80 unit	74 unit	9 unit	9 unit	100%	0	83 unit	104%
1	1	02	11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
1	1	02	11	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
1	1	02	11	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%

01	01	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan SDM aparatur	100	33,40%	16,70%	16,70%	100%	0,00%	50%	50%
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang berkualitas (orang)	72 bulan	24 bulan	0	0	0%	0	24	33%
02	1	02	11	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	0	3 paket	50%
02	1	02	11	15	10	Pelaksanaan Festival Langkisau	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	0	3 paket	50%
						Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mengases permodalan ke lembaga keuangan (UMKM)	180 UMKM	60UMKM	30UMKM	30UMKM	93%	0	88 UMKM	48%
					01	Penggunaan SKIP (sistem Informasi kredit program) KUR	Jumlah calon debitur potensi untuk dibiayai KUR kedalam SKIP (unitusaha)	600 UMKM	230 UMKM	0	0	0%	0	230 UMKM	38%
						Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengembangan produk unggulan daerah	9 produk	3 produk	1 produk	1 produk	100%	1 produk	5 produk	56%
						Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Persentase peningkatan pemodalan UMK	30%	0%	0%	0%	0%		0	0
					06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	360 UMKM	60 UKM	60 UKM	60 UKM	100%	0	120 UKM	33%
					14	Pendataan validasi data UMKM	jumlah UKM aktif yang didata (unit)	8000 UMKM	6968 UKM	7000 UKM	8619 UKM	107%	0	7000 UKM	88%
					16	Penyelenggaraan bazar dan promosi produk UMKM	jumlah bazar yang di ikuti (paket)	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%		3 paket	50%
					17	Bintek peningkatan Kapasitas SDM UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti bintek	600 UMKM	90 UKM	30 UKM	30 UKM	100%	0	90 UKM	15%
					21	Bantuan Sarana dan Prasarana bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan binaan (unit usaha)	400 UMKM	202 UKM	80 UKM	80 UKM	100%	0	215 UKM	54%

					24	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah UMKM ola PUD dengan Pedekatan OVOP yang terbina	600 UMKM	180 UKM	90 UKM	90 UKM	100%	0 UKM	210 UMK	35%
						Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra	200 UMK	0	30 UMKM	30 UMKM	0%	30 UMKM	60 UMK	15%
							Jumlah UMKM yang potensial yang diupoad kedalam aplikasi SIKP-KUR	300 UMK	0	100 UMKM	169 UMKM	0%	100 UMKM	269 UMKM	33%
							Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi permodalan	500 UMKM	0	150 UMKM	30 UMKM	0%	150 UMKM	180 UMKM	30%
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan aset koperasi	51%	46,00%	46%	46%	100%	48,00%	48,00%	90%
							Pesentase Koperasi dengan modal di atas 5 M	25 %	6%	6%	6%	100%		0	0%
					04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman kopersaian	Jumlah koperasi yang mengikuti bintek	300 koperasi	150 koperasi	60 koperasi	30 koperasi	100%	30 koperasi	210 Koperasi	60%
					05	Pembinaan dan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dan peringkat hari koperasi	Jumlah koperasi yang menerima penghargaan koperasi berprestasi	18 koperasi	12 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	100%	3 koperasi	18 Koperasi	83%
							Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	350 koperasi	225 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	100%	30 koperasi	285 koperasi	49%
					11	Pelatihan Akutansi Koperasi	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan (org)	150 orang	145 orang	0%	0%	0%	0	145 orang	97%
					25	Revitalisasi koperasi/KUD	jumlah koperasi yang direvilisasi	300 koperasi	150 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	100%	15 orang	170 orang	100%
					27	Bintek kelembagaan dan usaha koperasi	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bintek	300 koperasi	180 koperasi	40 koperasi	30 koperasi	100%	40 koperasi	240 Koperasi	80%
						URUSAN PERDAGANGAN									

06	1	02	11	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat pengelolaan SNI 8152:2015	9 pasar	2 pasar	1 pasar	1 pasar	100%	1 pasar	4 pasar	44,44%
							Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok antarwaktu	<9%	,9%	,9%	,9%	100%	,9%	,9%	50%
06	1	02	11	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang	Jumlah laporan pengawasan barang dan jasa	24 dokumen	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	20 laporan	83,33%
06	1	02	11	15	04	Operasionalisasi dan perlengkapan UPTD Kemetrolgian	Tertaksana-nya persiapan pelayanan UPTD(bulan)	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
06	1	02	11	15	22	Pemantauan harga dan Operasi Pasar	Jumlah Kecamatan yang dilaksana-kan pemantauan harga barang (kecamatan)	30 kecamatan	6 kecamatan	4 kecamatan	10 kecamatan	250%	10 Kecamatan	26 kecamatan	87%
							Jumlah papan display informasi harga 9unit)	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	80%
06	1	02	11	15	24	Pembuatan Database Perdagangan	Database perdagangan(dok)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	2 dokumen	40%
06	1	02	11	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat teknis SNI 8152:2015	9 pasar	5 pasar	1 pasar	1 pasar	100%	1 pasar	1 pasar	66,66%
06	1	02	11	18	06	Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah laporan persediaan stock barang kebutuhan konsumen	24 dokumen	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	20 laporan	83,33%
06	1	02	11	18	11	Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan pengelolaan Pasar	Data Realisasi PAD Pasar	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	48 bulan	66,66%
06	1	02	11	18	12	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Operasional pengelolaan pasar (bln)	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	60 bulan	80%
06	1	02	11	18	34	Peningkatan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	20 pasar	9 pasar	0	0	0%	2 pasar	9 pasar	45%

06	1	02	11	18	43	Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan	Jumlah bangunan Pasar yang direhap	15 pasar	8 pasar	0	0	0%	0	8 pasar	53,33%
06	1	02	11	18	50	Revitalisasi pasar hilalang kecamatan pancung soal (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016)	Jumlah bangunan Pasar yang direhap	1 pasar	1 pasar	0	0	100%		1 pasar	100%
06	1	02	11	18	51	Revitalisasi pasar balai jumat lagan kecamatan LSB (Alokasi dana bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi TA 2016)	Jumlah bangunan Pasar yang direhap	1 pasar	1 pasar	0	0	100%		1 pasar	100%
06	1	02	11	18	56	Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisa-si	24 pasar	22 pasar	9 pasar	9 pasar	100%	2 pasar	33 pasar	129%
06	1	02	11	18	58	Rehab Pasar Asam Kumbang Kecamatan IV Nagar Bayang Utara (Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Propinsi TA 2017)	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	1 pasar	1 pasar	0	0	0%		0	0%
06	1	02	11	18	60	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Penunjang Operasional Percepatan Pembangunan Pasar Kabupaten	48 bulan	24 bulan	0 bulan	0 bulan	100%	0	24 bulan	50%
06	1	02	11	18	63	Pembuatan buku Profil Pasar Kab. Pesisir Selatan	Data profil Pasar (dok)	4 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	0	0	50%
06	1	02	11	18	65	Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK)	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	15 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar		0	5 pasar	33%
URUSAN PERINDUSTRIAN															
07	1	02	11	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM	170 produk	5 produk	5 produk	5 produk	100%	25 produk	30 produk	21%
07	1	02	11	16	09	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi (unit usaha)	60 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	100%	40 IKM	70 IKM	117%

07	1	02	11	16	10	Pemutakhiran Data IKM	Data IKM (dok)	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	5 dokumen	67%
07	1	02	11	16	15	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	Jumlah Promosi Produk unggulan daerah	36 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	7 dokumen	6 dokumen	52%
07	1	02	11	16	20	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)	Perda REPIK (dok)	3 dok	2 dokumen	0	0	100%	0	2 dokumen	66,66%
						Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri kecil dan Menengah	Jumlah aturan yang dikeluarkan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	
07	1	02	11	16	22	Fasilitasi IKM terhadap Pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi (unit)	125 unit		25 unit	25 unit		0	0	20%
07	1	02	11	16	24	Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dilatih	250 IKM		40 IKM	40 IKM				16%
07	1	02	11	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah kelembagaan sentra IKM	6 lembaga	0	1 lembaga	1 lembaga	100%	3 lembaga	5 lembaga	83%
07	1	02	11	19	5	Penumbuhan dan Penataan Sentra-sentra Industri Unggulan	Jumlah IKM sentra yang dibina dan dilatih	240 IKM	15 IKM	40 IKM	40 IKM	100%	40 IKM	105 IKM	27%
07	1	02	11	19	07	Pembangunan Sentra IKM (DAK) 2018	Jumlah sarana sentra IKM yang dibangun	3 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	33,33%
07	1	02	11	19	08	Pembangunan Gedung Sentra IKM (Penunjang DAK)	Penunjang Operasional Pembangunan Sentra IKM	36 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	67%
07	1	02	11	20		Program Peningkatan Iklim Usaha Industri	Jumlah IKM yang dibina	400 IKM					50 IKM	0	12,5%
07	1	02	11	20	02	Pembinaan dan Pengawasan IKM	Jumlah IKM yang dibina	400 IKM		50 IKM	50 IKM		100 IKM	150 IKM	12,5%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masing masing Perangkat Daerah menetapkan NSPK dan SPM maupun IKK dan mengevaluasi atau menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) , keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Namun demikian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian belum tersedia NSPK dan SPM serta IKK dalam peraturan pemerintah tersebut

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Rendahnya Kemampuan Pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila koperasi tersebut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dan tepat waktu disamping berkembangnya usaha dan meningkatnya modal usaha. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan usaha Koperasi. Pelaksanaan RAT secara periodik dapat mencerminkan dan menggambarkan perkembangan usaha koperasi dan tertib administrasi dan keuangan.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk pengembangan koperasi, sehingga untuk pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih belum berperannya koperasi sebagai penggerak roda perekonomian. Disisi lain sektor-

sektor lembaga keuangan semakin berkembang seperti Bank, BPR, Asuransi dan Finance.

Hal ini disebabkan rendahnya SDM pengelola Koperasi serta kemauan pengurus dan anggota untuk mengembangkan koperasi dan terbatasnya akses jaringan usaha dengan lembaga lain. Dalam perkembangannya dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT setiap tahunnya adalah sekitar 5%. Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

b. Belum terwujudnya daya saing industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar dalam negeri dan luar negeri, hal ini disebabkan karena produk kita masih belum memiliki daya saing. IKM belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan tidak beragam dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

c. Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari) dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari disamping itu juga ada pasar- pasar kaget pasar pagi yang tersebar di Kecamatan yang sifatnya tidak permanen/darurat sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi menuju pasar rakyat ber kriteria SNI, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya melengkapi sarana dan

prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementerian Perdagangan RI. Pasar yang telah direvitalisasi melalui dana DAK Kementerian Perdagangan RI adalah Pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, Pasar Batang Kapas, Pasar Painan dan Pasar Sago di Kecamatan IV Jurai, sedangkan pasar yang telah dibangun dengan dana Tugas Pembantuan adalah Pasar rakyat dikawasan Carocok Mandeh Tarusan dan Pasar Kambang dan Pasar Batang Kapas. Dan pasar labuhan. Pada Tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan alokasi dana APBN untuk pembangunan Pasar rakyat lakitan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaandan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Painan	pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12 Bln	1.426.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Painan	pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12 Bln	1.240.500.000	
	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya air dan listrik	Painan, Salido, Sago	Tersedianya air dan listrik (bln)	12 bulan	285.000.000	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya air dan listrik	Painan, Salido, Sago	ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	12 bulan	298.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Painan, Salido, Sago	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	355.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Painan, Salido, Sago	ketersediaan layanan administrasi keuangan	12 bulan	195.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Painan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bln)	12 bulan	195.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Painan	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	125.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Painan	Tersedianya alat tulis kantor (bln)	12 bulan	53.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Painan	ketersediaan alat tulis	12 bulan	85.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Painan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bln)	12 bulan	55.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Painan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Painan	Tersedianya Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan (bln)	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Painan	ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Painan	Tersedianya Bahan Bacaan (bln)	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Painan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	15.000.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Painan	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu (bln)	12 bulan	78.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Painan	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	42.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Painan	Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat ke luar daerah (bln)	12 bulan	210.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Painan	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	305.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Painan	Terpenuhi perjalanan dinas untuk rapat-rapat dalam daerah (bln)	12 bulan	155.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Painan	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	50.000.000	
Monitoring dan evaluasi kegiatan	Painan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan OPD		50.000.000	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Painan	Laporan monev kegiatan	4 laporan	35.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Painan	Tersedianya operasional untuk perencanaan dan pelaporan (bln)	12 bulan	75.000.000	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Painan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	23 dokumen	40.000.000	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Painan	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (persentase)			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Painan	Meningkatnya kecukupan sarana dan prasarana aparatur (persentase)		239.000.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Painan	Tersedianya peralatan gedung kantor Unit)	40 unit	250.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Painan	Jumlah peralatan gedung kantor dibeli	28 unit	74.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Painan	Trsedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bln)	12 bulan	280.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Painan	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	25.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	Painan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas (bln)	12 bulan	220.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	Painan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	12 bulan	115.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Painan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (bln)	12 bulan	40.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Painan	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	25.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Painan	Persentase peningkatan SDM aparatur	12 bulan	55.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Painan	Persentase peningkatan SDM aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Painan	jumlah ASN yang berkualitas (orang)	12 bulan	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Painan	jumlah ASN yang berkualitas (orang)		-	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Painan	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	1 paket	350.000.000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Painan	Promosi Produk unggulan daerah(paket)		-	
	Pelaksanaan Festival Langkisau	Painan	Promosi Produk unggulan daerah(paket)	1 paket	350.000.000	Pelaksanaan Festival Langkisau	Painan	Promosi Produk unggulan daerah(paket)		-	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kab. pessel	Jumlah UMKM yang mengases permodalan ke lembaga keuangan (UMKM)	20 UMKM	550.000.000	Jumlah UMKM yang mengases permodalan ke lembaga keuangan (UMKM)	Kab. pessel	Jumlah UMKM yang mengases permodalan ke lembaga keuangan (UMKM)	20 UMKM	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. pessel	Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah (pembinaan dan bimtek)	3 produk	330.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. pessel	Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah (pembinaan dan bimtek)	0	-	
			Jumlah Bantuan Sarana pada UMKM	80 UMKM	220.000.000			Jumlah Bantuan Sarana pada UMKM	0	-	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Kab. pessel	Persentase peningkatan permodalan UMK pertahun		1.050.000.000	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Kab. pessel	Persentase peningkatan permodalan UMK pertahun		1.600.000.000	
	Pendataan validasi data UMKM	Kab. pessel	data UMKM	1 dokumen	100.000.000	Pendataan validasi data UMKM	Kab. pessel	data UMKM	0	-	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kab. pessel	jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan		450.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kab. pessel	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengembangan kewirausahaan, Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Proposal Pengembangan Usaha, Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen	0	-	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. pessel	Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah (pembinaan dan bimtek)	1 Dokumen	700.000.000	
								Jumlah Bantuan Sarana pada UMKM	250 UMKM		
	Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kab. pessel	Jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra	30 UMKM	500.000.000	Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah		Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	60 UMKM	300.000.000	
		Kab. pessel	Jumlah UMKM potensial yang diupload kedalam aplikasi SIKP KUR	100 UMKM				Database UMKM	1 Dokumen		

		Kab. pessel	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi Permodalan	150 UMKM							
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	Kab. pessel	Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM	150 UMKM dan Koperasi	400.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)		Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM	190 UMKM dan Koperasi	600.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. pessel	Persentase koperasi aktif melaksanakan RAT	46%	1.125.000.000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. pessel	Persentase peningkatan aset koperasi	3,40%	925.000.000	
		Kab. pessel	Pesentase Koperasi dengan modal di atas 5 M								
	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berpestasi	Kab. pessel	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	150 koperasi	530.000.000	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berpestasi	Kab. Pessel	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	69 koperasi	500.000.000	
								Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	30 koperasi		
								Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan bank/non bank	24 koperasi		
								Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya	60 koperasi		

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Bimbingan teknis dan Pelatihan perkoperasian	Kab. pessel	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan akuntansi koperasi	60 orang pengurus KSP/USP	140.000.000	Bimbingan teknis dan Pelatihan perkoperasian	Kab. pessel	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Mengikuti Bimtek/ Diklat	60 orang pengurus KSP/USP	175.000.000	
		Kab. pessel	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek kelembagaan koperasi	60 Koperasi	120.000.000		Kab. pessel				
	Revitalisasi koperasi/KUD	Kab. pessel	jumlah koperasi yang direvitalisasi	60 Koperasi	85.000.000	Revitalisasi koperasi/KUD	Kab. Pessel	Jumlah Koperasi yang dibubarkan	60 Koperasi	100.000.000	
								Jumlah Koperasi yang diaktifkan kembali			
								Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK			
	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian	Kab. pessel	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi perubahan anggaran dasar	60 Koperasi	80.000.000	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian	Kab. pessel	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Mengikuti Bimtek/ Diklat	120 koperasi	150.000.000	
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kab. pessel	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	60 Koperasi	85.000.000	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kab. pessel	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	0		
	Monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM	Kab. pessel	Laporan Monev koperasi dan UMKM penerima bantuan pemerintah	60 Koperasi	85.000.000	Monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM	Kab. pessel	Laporan Monev koperasi dan UMKM penerima bantuan pemerintah	0		

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kab. pessel	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat pengelolaan SNI 8152:2015	1 pasar	22.013.250.000	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kab. pessel	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat pengelolaan SNI 8152:2015	1 pasar	1.200.000.000	
		Kab. pessel	Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu	<9%			Kab. pessel	Koefesien variasi harga bahan kebutuhan pokok antar waktu	<9%		
	Peningkatan pengawasan peredaran barang	Kab. pessel	Jumlah kecamatan yang diawasi barang beredar	15 Kecamatan	150.000.000	Peningkatan pengawasan peredaran barang	Kab. pessel	Jumlah laporan pengawasan barang dan jasa	4 laporan	150.000.000	
	Operasionalisasi dan perlengkapan UPTD Kemetrolgian	Kab. pessel	Terlaksana-nya persiapan pelayanan UPTD(bulan)	12 bulan	750.000.000	Operasionalisasi dan perlengkapan UPTD Kemetrolgian	Kab. pessel	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah terhadap pelaku usaha	2700 alat	850.000.000	
								Dukungan manajemen dan dukungan teknis pelayanan administrasi kantor UPTD	12 bulan		
								jumlah pengawasan kemetrolgian	35 lokasi		
	Pemantauan harga dan Operasi Pasar	Kab. pessel	Jumlah Kecamatan yang dilaksana-kan pemantauan harga barang (kecamatan)	4 kecamatan	350.000.000	Pemantauan harga dan Operasi Pasar	Kab. pessel	Jumlah laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya	4 laporan	200.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

		Kab. pessel	Jumlah papan display informasi harga 9unit)	2 unit				Operasi pasar	2 paket		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kab. pessel	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat teknis SNI 8152:2015	3 pasar	20.633.250.000	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kab. pessel	Jumlah pasar rakyat memenuhi syarat teknis SNI 8152:2015	3 pasar	37.250.000.000	
	Pembuatan Database Perdagangan	Kab. pessel	Database perdagangan dan profil pasar(dok)	1 dokumen	130.000.000	Pembuatan Database Perdagangan					
	Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. pessel	Jumlah Promosi Produk Unggulan Daerah(paket)	2 paket	300.000.000	Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. pessel	Jumlah laporan persediaan stock barang kebutuhan konsumen	2 paket, 4 laporan	125.000.000	
								Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM			
	Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan pengelolaan Pasar	Kab. pessel	Data Realisasi PAD Pasar	12 laporan	130.000.000	Pelayanan Administrasi Penerimaan/ Tagihan dan pengelolaan Pasar	Kab. pessel				
	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Kab. pessel	Operasional pengelolaan pasar (bln)	12 bulan	380.000.000	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Kab. pessel	Jumlah Petugas Pasar yang bina	71 orang	850.000.000	
								Database perdagangan	1 dokumen		
	Peningkatan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. pessel	Pasar Nagari yang terbangun / direvitalisasi (unit)	5 pasar	800.000.000	Peningkatan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. pessel	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	5 pasar	1.900.000.000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel	Jumlah pasar yang drehab/dipelihara			Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Pasar Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel	Jumlah pasar yang drehab/dipelihara	3 pasar	1.000.000.000	
	Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisa-si	4 pasar	15.000.000.000	Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi, jumlah papan display informasi harga	23 pasar	30.025.000.000	
	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel	Penunjang Operasional Percepatan Pembangunan Pasar Kabupaten	12 bulan	500.000.000	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan	Kab. pessel			-	
	Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK)	Kab. pessel	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	3 pasar	3.000.000.000	Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK)	Kab. pessel	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	2 pasar	3.000.000.000	
	Penyelenggaraan painan Expo	Painan	Terlaksananya pameran/ painan expo	1 event	393.250.000	Penyelenggaraan painan Expo	Painan	Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	1 event	350.000.000	
	URUSAN PERINDUSTRIAN	Kab. pessel									
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. pessel	Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM	30 produk	956.000.000	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. pessel	Jumlah fasilitasi legalitas produk IKM	30 produk	1.957.000.000	
	Pemutakiran Data Base IKM	Kab. Pessel	Data Base IKM	1 Dokumen	66.000.000	Pemutakiran Data Base IKM	Kab. Pessel				
	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD	Kab. Pessel	Jumlah IKM yang difasilitasi dengan Swasta/BUMN/BUMD	50 IKM	85.000.000	Jumlah IKM yang bermitra	Kab. Pessel	Jumlah IKM yang difasilitasi dengan Swasta/BUMN/BUMD	10 IKM	100.000.000	
	Penunjang Operasional Dekranasda dan pembinaan IKM	Kab. Pessel	- Jumlah pameran / event yang diikuti	7 Event	530.000.000	Penunjang Operasional Dekranasda dan pembinaan IKM	Kab. Pessel				

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

			- Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan dan pelatihan serta jumlah bantuan yang disalurkan	20 IKM				0		
			- Jumlah bantuan yang disalurkan	2 Paket				0		
	Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri		- Jumlah pameran / event yang diikuti				Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	6 IKM	500.000.000	
	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang Industri Kecil dan Menengah	Kab. Pessel	Ranperda RPIK yang diajukan ke DPRD	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang Industri Kecil dan Menengah				
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Painan	Jumlah bantuan sarana prasarana IKM yang disalurkan	1 paket	100.000.000	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Painan	Jumlah produk IKM yang terfasilitasi sertifikasi, standarisasi dan legalisasi	58 produk	1.057.000.000
							Kios Ikm	1 paket		
	Pembinaan dan Pengawasan IKM	Kab. Pessel	- Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	100 IKM	100.000.000		Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	14 IKM	300.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Kab. Pessel								
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Kab. Pessel	Jumlah IKM yang terbina	60 IKM	300.000.000		Pessel			
	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Kab. Pessel				PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Kab. Pessel			

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

	Penyediaan sarana maupun prasarana pemasaran produk IKM	Kab. Pessel	Jumlah Outlet pemasaran produk IKM	10 Outlet	1.000.000.000	Penyediaan sarana maupun prasarana pemasaran produk IKM	Kab. Pessel				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL					PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL				18.250.000.000	
	Pengembangan sentra Industri Kecil menengah	Pessel	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan	3 Sentra	270.000.000	Pengembangan sentra Industri Kecil menengah	Pessel				
	Penumbuhan dan penataan kelompok industri unggulan	Pessel	Jumlah kelompok industri unggulan yang ditumbuhkan dan ditata	5 kelompok	150.000.000	Penumbuhan dan penataan kelompok industri unggulan	Pessel	Jumlah Kelompok IKM yang berpotensi sentra	6 kelompok	150.000.000	
	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	Koto XI Tarusan	Jumlah sentra IKM yang dibangun	1 paket	16.000.000.000	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	Koto XI Tarusan	Jumlah sarana dan prasarana sentra IKM yang dibangun	1 sentra	18.000.000.000	
	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)		Tersediannya penunjang Pembanguann sentra IKM	1 paket	160.000.000	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)		Jumlah sarana dan prasarana sentra IKM yang dibangun	1 paket	100.000.000	

BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERAS, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian yang memuat sebagai berikut:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Koperasi, UMKM Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
 3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh Masyarakat.
- b. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 - 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.
 2. Peningkatan Perlindungan Konsumen.
 3. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri.
 4. Peningkatan Pengamanan Perdagangan.
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
 2. Meningkatnya penyerap tenaga kerja di sector industri
 3. Memperkuatnya struktur industri

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfokus pada kebijakan Pembangunan perekonomian dengan program dan kegiatan masing-masing SKPD

a. Tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMK Tangguh
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik

b. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya omset perdagangan
2. Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu
3. Meningkatnya kinerja koperasi
4. Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil

5. Meningkatnya omset IKM.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah dikemukakan maka Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021 yang memberikan arahan dalam mengoptimalkan Pembangunan dibidang perekonomian.

Melalui kebijakan ini sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
12. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Urusan Bidang/ Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	SEKRETARIAT DINAS				1.479.500.000	-			1.627.450.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	memenuhi layanan administrasi perkantoran		12 Bln	1.240.500.000	-		12 Bln	1.364.550.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Painan, Salido, Sago	12 bulan	298.000.000	APBD		12 bulan	327.800.000
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Painan, Salido, Sago	12 bulan	195.000.000	APBD		12 bulan	214.500.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Painan	12 bulan	125.000.000	APBD		12 bulan	137.500.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	Painan	12 bulan	85.500.000	APBD		12 bulan	94.050.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Painan	12 bulan	40.000.000	APBD		12 bulan	44.000.000
6	Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Painan	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	11.000.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Painan	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	16.500.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Painan	12 bulan	42.000.000	APBD		12 bulan	46.200.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bulan	305.000.000	APBD		12 bulan	335.500.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	55.000.000
11	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Laporan monev kegiatan	Painan	4 laporan	35.000.000	APBD		4 laporan	38.500.000

Rencana Kerja Tahun 2021

12	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Painan	23 dokumen	40.000.000	APBD		23 dokumen	44.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				239.000.000				262.900.000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dibeli	Painan		<u>74.000.000</u>	APBD			81.400.000
		- Pengadaan Kursi		5 unit	9.000.000				
		- Pengadaan Laptop		10 unit	30.000.000				
		- Pengadaan meja biro (ruangan coaching cilinic		3 unit	2.500.000				
		- Pengadaan Printer		5 unit	17.500.000				
		- Pengadaan Filling Cabinet		2 unit	15.000.000				
2	Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Painan	2 gedung	25.000.000	APBD		2 gedung	27.500.000
3	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	Painan	(3 unit Roda 4 dan 9 unit roda 2)	115.000.000	APBD		(3 unit Roda 4 dan 9 unit roda 2)	126.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	Painan	40 unit	25.000.000	APBD			27.500.000
	Urusan Wajib								
B	BIDANG KOPERASI, UMKM				3.450.000.000				2.667.500.000
VI	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM				2.525.000.000				1.760.000.000
1	Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase peningkatan pemodaln UMK	Kab. Pessel	10%	1.600.000.000	APBD		30 UMKM	1.760.000.000
		Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	Kab. Pessel	60 UMKM	300.000.000			100 UMKM	
		Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi Permodalan		1 Dokumen				150 UMKM	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM		250 UMKM	700.000.000			3 produk	770.000.000

Rencana Kerja Tahun 2021

		Jumlah Bantuan sarana bagi UMKM						0	
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM	Kab. Pessel	190 UMKM dan Koperasi 190 UMKM dan Koperasi	600.000.000				660.000.000
VII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan aset koperasi		3,40%	925.000.000	-			907.500.000
1	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berpestasi	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Kab. Pessel	69 koperasi	500.000.000	APBD		75 Koperasi	550.000.000
		Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Pessel	30 koperasi				75 Koperasi	
		Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan bank/non bank	Kab. Pessel	24 koperasi				3 koperasi	
		Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya	Kab. Pessel	60 koperasi				1 kegiatan	
2	Bimbingan teknis dan Pelatihan perkoperasian	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Mengikuti Bimtek/ Diklat	Kab. Pessel	60 orang pengurus KSP/USP	175.000.000	APBD		60 orang pengurus KSP/USP	192.500.000
3	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Mengikuti Bimtek/ Diklat	Kab. Pessel	120 Koperasi	150.000.000	APBD		60 Koperasi	165.000.000
4	Revitalisasi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibubarkan	Kab. Pessel	117 Koperasi	100.000.000				
		Jumlah Koperasi yang diaktifkan kembali	Kab. Pessel	34 koperasi					
		Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK		120 koperasi					
	Urusan Pilihan								-
D	SEKTOR PERDAGANGAN				38.450.000.000				42.295.000.000
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				1.200.000.000	-	-		1.320.000.000
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan pengawasan barang dan jasa	Kab. Pessel	4 laporan	150.000.000	APBD		15 kec	165.000.000

Rencana Kerja Tahun 2021

2	Pemantauan harga dan operasi pasar	Jumlah laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya	Kab. Pessel	4	200.000.000	APBD		6 Kec	220.000.000
		Operasi pasar	Kab. Pessel	2 paket				2 paket	
3	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah terhadap pelaku usaha	Kab. Pessel	2700 alat	850.000.000	APBD		12 bulan	935.000.000
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis pelayanan administrasi kantor UPTD		12 bulan					
IX	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Pasar Rakyat yang menuju SNI		3 pasar	37.250.000.000				40.975.000.000
1	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah laporan persediaan stock barang kebutuhan konsumen	Dim & Luar prov	4 laporan	125.000.000	APBD		2 paket	137.500.000
		Jumlah pelaku UMK yang terfasilitasi peningkatan SDM		5 pelaku usaha					
2	Penyelenggaraan Painan Ekspo	Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	Painan	1 paket	350.000.000	APBD		1 paket	385.000.000
3	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	Kab. Pessel	16 pasar	30.025.000.000	APBD		6 pasar	33.027.500.000
	Pembangunan drainase keliling, instalasi listrik, water toren dan taman pasar rakyat mandeh		Psr rakyat mandeh		1.500.000.000				
	Pembangunan TPS dan WC pasar barung barung belantai		Psr Barung barung Belantai		400.000.000				
	Revitalisasi petak toko pasar baru bayang dan TPS		pasar baru bayang		2.000.000.000				
	Pembangunan TPS dan Pos Jaga Salpam pasar Sago		pasar sago		400.000.000				
	Pembangunan los pasar lumpo		pasar lumpo		200.000.000				
	Revitalisasi petak toko bagian tengah pasar painan		pasar painan		2.000.000.000				
	Pembangunan TPS dan Drainase Pasar Batang Kapas		pasar batang kapas		200.000.000				
	Lanjutan pembangunan pasar surantih		pasar surantih		9.000.000.000				

Rencana Kerja Tahun 2021

Pembangunan Los Pasar Ranah Ampek Hulu	Ranah Ampek Hulu	350.000.000				
pembangunan drainase keliling, TPS dan Taman pasar Lakitan	pasar lakitan	750.000.000				
Revitalisasi Petak Toko pasar Balai Selasa	pasaar balai Selasa	750.000.000				
Revitalisasi petak toko pasar Air haji	pasar air haji	1.750.000.000				
Pembangunan petak darurat pasar air haji	pasar air haji	200.000.000				
Pembangunan los besar, TPS dan taman pasar inderapura	pasar inderapura	750.000.000				
Pembangunan taman dan TPS pasar Tapan	pasar tapan	400.000.000				
Revitalisasi los Pasar Sungai Sirah Silaut	pasar silaut	400.000.000				
Pembangunan taman dan TPS pasar Lunang	pasar lunang	400.000.000				
Pengadaan papan informasi harga	pasar tapan dan B. Selasa, inderapura, sago, mandeh	400.000.000				
Lanjutan pembangunan pasar sungai sirah	silaut	950.000.000				
Lanjutan pembangunan pasar lunang	lunang	1.000.000.000				
Pembangunan pasar Airpura	airpura	750.000.000				
Pembangunan rumah bak container (PPS) pasar punggasan	LSB	200.000.000				
Pembangunan los makanan pasar balai Selasa	Balai Selasa	100.000.000				
Pengadaan canopy pasar sungai tunu	LSB	35.000.000				
Pembangunan pasar Lakitan	Lengayang	1.200.000.000				
Revitalisasi pasar Painan (Bagian belakang)	Painan	2.000.000.000				
Pengadaan canopy bisniscentre Painan	Painan	100.000.000				

Rencana Kerja Tahun 2021

	Pembangunan petak pasar rakyat mandeh		Tarusan		730.000.000				
	Revitalisasi pasar Barung barung belantai		Tarusan		1.000.000.000				
	Pengadaan plang merk larangan berjualan diatas trotoar dan himbauan kebersihan		Kab. Pessel		20.000.000				
	Pengadaan payung dan tenda pedagang kaki lima		Painan		90.000.000				
4	Peningkatan pasar nagari dalam kabupaten pesisir selatan	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	Kab Pessel	3 pasar	1.900.000.000	APBD		3 pasar	2.090.000.000
			pasar sore simpang lagan		200.000.000				
			pasar pancung taba		200.000.000				
			Pasar taluak batang kapas		1.200.000.000				
			pembangunan los pasar muaro aia		100.000.000				
			Pembangunan los pasar nagari pasir binjai		200.000.000				
5	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Pasar Kab.Pesisir Selatan	Jumlah pasar yang drehab/dipelihara	Per Baru	4 pasar	1.000.000.000	APBD		4 pasar	1.100.000.000
			psr batang kapas		300.000.000				
			Pasar Tarusan,		500.000.000				
			Pasar balai selasa		200.000.000				
6	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	Jumlah Bangunan pasar yg dibangun / Revitalisasi / direhab	Kab. Pessel	2 pasar	3.000.000.000			2 pasar	3.300.000.000
	'- Pembangunan petak toko pasar air haji		Pasar Air haji		1.500.000.000				
	'- revitalisasi petak toko bagian		Pasar baru						

	belakang pasar baru bayang		bayang		1.500.000.000				
7	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah Petugas Pasar yang bina	Kab. Pessel	71 rang	850.000.000	APBD		12 laporan	935.000.000
		Database perdagangan		1 dokumen					
C	SEKTOR PERINDUSTRIAN				19.907.000.000				22.023.100.000
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				1.657.000.000				1.948.100.000
1	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD	Jumlah IKM yang bermitra		10 IKM	100.000.000	APBD		12 IKM	110.000.000
2	Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	Kab. Pessel	6 IKM	500.000.000	APBD		6 IKM	550.000.000
3	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah produk IKM yang terfasilitasi sertifikasi, standarisasi dan legalisasi		58 produk	1.057.000.000			58 produk	502.700.000
		Fasilitasi pelatihan dan sosialisasi	Painan	1 paket	135.000.000			1 paket	148.500.000
		- Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi Halal dan Uji laboratorium		20 IKM	15.000.000			20 IKM	16.500.000
		- Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi barcode dan MD BPOM		20 IKM	20.000.000			20 IKM	22.000.000
		- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Souvenir kerajinan anyaman pandan dan anyaman lidi		20 IKM	50.000.000			20 IKM	55.000.000
		- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan kualitas kemasan dan manajemen pemasaran produk IKM pangan potensial		20 IKM	50.000.000			20 IKM	55.000.000
		Sertifikasi			122.000.000				134.200.000
		- Jumlah produk Sertifikasi halal		20 produk	70.000.000			20 produk	77.000.000
		- Jumlah produk Pendaftaran Merek (HKI)		10 produk	7.000.000			10 produk	7.700.000
		- Jumlah produk Indikasi Geografis (HKI) Produk IKM budaya/ karakteristik lokal		1 produk	30.000.000			1 produk	33.000.000

Rencana Kerja Tahun 2021

		(Pendaftaran dan Naskah akademis)							
		- Jumlah produk Pendaftaran Uji Laboratorium (SNI dan nutrition facts)		10 produk	15.000.000			10 produk	16.500.000
		Jumlah IKM terfasilitasi bantuan kemasan IKM		10 IKM	200.000.000			10 IKM	220.000.000
		Kios IKM	IV jurai	10 unit	600.000.000				
									-
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL				18.250.000.000				20.075.000.000
1	Penumbuhan dan penataan kelompok industri unggulan	Jumlah Kelompok IKM yang berpotensi sentra	Pessel	6 kelompok	150.000.000	APBD		6 kelompok	165.000.000
2	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana sentra IKM yang dibangun	Koto XI Tarusan	1 sentra	18.000.000.000			1 sentra	19.800.000.000
3	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana sentra IKM yang dibangun		1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
TOTAL					63.286.500.000				68.613.050.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Program Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN,).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3
A	SEKRETARIAT DINAS	1.479.500.000
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.240.500.000
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	298.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	125.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	85.500.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.000.000
7	penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15.000.000
8	Pednyediaan makanan dan minuman	42.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	305.000.000
10	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000
11	Monitoring dan evaluasi kegiatan	35.000.000
12	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	40.000.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	239.000.000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	74.000.000
2	Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor	25.000.000
3	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	115.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000
	BIDANG KOPERASI, UMKM	2.455.000.000
III	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	1.600.000.000
1	Menfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	300.000.000
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	700.000.000
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	600.000.000
IV	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	855.000.000
1	Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi	575.000.000
2	Bimbingan teknis dan Pelatihan perkoperasian	220.000.000
3	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian	60.000.000
	Urusan Pilihan	
	SEKTOR PERDAGANGAN	38.320.000.000
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.070.000.000
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	120.000.000
2	Pemantauan harga dan operasi pasar	100.000.000
3	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	850.000.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	37.250.000.000
1	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	125.000.000
2	Penyelenggaraan Pameran Ekspo	350.000.000
3	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	30.025.000.000
4	Peningkatan pasar nagari dalam kabupaten pesisir selatan	1.900.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Pasar Kab.Pesisir Selatan	1.000.000.000
6	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	3.000.000.000

8	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	850.000.000
	SEKTOR PERINDUSTRIAN	19.907.000.000
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.657.000.000
1	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta/BUMN/BUMD	100.000.000
2	Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	500.000.000
3	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1.057.000.000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	18.250.000.000
1	Penumbuhan dan penataan kelompok industri unggulan	150.000.000
2	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	18.000.000.000
3	Pembangunan Sentra IKM (Penunjang DAK)	100.000.000

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat (RPJM Prop) Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas propinsi maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2021.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Kontribusi pelaku usaha baik sektor perdagangan maupun sektor perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan